

Optimalisasi Layanan Kounsultasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bansos Pada Dinsos Kota Kendari

Tegar Almuufarid^{1*}, Syamsul Alam², Justawan³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Halu Oleo

email : uh8258980@gmail.com

Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memutuskan dan menjabarkan perkembangan penyelenggaraan konferensi informasi Bansos pemerintah yang terkoordinasi dalam sosialisasi Bansos pada Bansos Kota Kendari. Selain itu, terdapat variabel pendukung dan penekan. Eksplorasi yang dilakukan di Bansos Kota Kendari ini, merupakan pemeriksaan subyektif dengan pendekatan elusidasi. Ujian tidak ditetapkan menjadi 5 orang yang diselesaikan dengan menggunakan strategi pengujian yang bertujuan. Prosedur pengumpulan informasi adalah persepsi, pertemuan luar dan dalam, serta studi catatan. Strategi investigasinya adalah model pemeriksaan subjektif Miles dan Huberman. Dampak dari peninjauan tersebut adalah (1) penyelenggaraan diskusi informasi Bansos pemerintah yang terkoordinasi dalam pendistribusian Bansos di Bansos Kota Kendari telah selesai sesuai dengan Pedoman Pelayanan Sosial Nomor 3 Tahun 2021, namun belum berjalan ideal. Sebab, persoalan informasi masih terlacak mulai dari NIK, nama, dan alamat. belum tersinkronisasi dan belum dilakukan pemugaran informasi, hal ini dikarenakan direktur informasi DTKS Bansos Kota Kendari hanya diawasi oleh satu orang saja, sehingga pelaksanaan perubahan informasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. (2) Variabel pendukung selama pengukuhan dan persetujuan informasi DTKS pada Bansos Kota Kendari adalah: adanya dukungan pengarahannya khusus kepada bos dan pendamping SLRT, adanya kantor pendukung informasi pengurus pelaksana, dan adanya dukungan daerah setempat. (3) Variabel penghambatnya adalah masih adanya informasi daerah setempat yang belum selaras dengan informasi yang ada di Disdukcapil, pemanfaatan informasi penerima bantuan.

Kata kunci : Layanan Kounsultasi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Bantuan Sosial.

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the optimization of integrated social welfare data consultation services in the distribution of social assistance at the Kendari City Social Service. Besides that, there are supporting and inhibiting factors. This research was carried out at the Kendari City Social Service and is qualitative research with a descriptive approach. The research informants were determined to be 5 people who were determined using purposive sampling techniques. Data collection techniques are observation, in-depth interviews, and document study. The analysis technique is the Miles and Huberman model of qualitative analysis. The results of the research concluded that (1) the integrated social welfare data consultation service in the distribution of social assistance at the Kendari City Social Service has been carried out by the Ministry of Social Regulation Number 3 of 2021, but is not yet optimal because data problems are still found starting from NIK, name, and address. is not synchronized and the data has not been updated, this is because the Kendari City Social Service DTKS data manager is only managed by one person, so the implementation of data correction

is not fully effective. (2) The supporting factors in the process of verifying and validating DTKS data at the Kendari City Social Service are the existence of technical guidance support for SLRT supervisors and facilitators, the existence of supporting facilities for data management implementers, and the existence of community support. (3) The inhibiting factor is that there is still community data that is not in sync with data at the Disdukcapil, use of data on aid recipients.

Keywords: *Consultation Services, Integrated Social Welfare and Social Assistance.*

PENDAHULUAN

Bansos adalah pemberian batuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dan yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bansos ini merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (Permen Sosial No, 1 Tahun 2019).

Oleh karena itu diperlukan penyelenggaraan Bantuan Informasi Terkoordinasi Pemerintah Sosial (DTKS) yang ideal. DTKS merupakan hal yang paling mendesak dalam menetapkan sasaran dan tata cara Pelayanan Para Pihak, sehingga pemberian data DTKS kepada daerah setempat agar tujuan dalam pemberian bantuan tepat dan tidak menimbulkan permasalahan di daerah. Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang umum terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia.

Terkait dengan pelayanan DTKS, kegiatan optimalisasi layanan yang telah dilakukan antara lain adalah: (1) Pembuatan media visual dengan banner, bertujuan agar mempermudah penyebaran ke beberapa Kelurahan dan Rukun Tetangga dan mempermudah dalam penyebaran informasi di masyarakat, (2) Pembuatan Media Digital dengan pembuatan Video, bertujuan agar masyarakat dengan mudah mengakses terkait informasi DTKS karena media sosial sudah menjadi hal umum di masyarakat. (3) Pembuatan media visual dengan banner, bertujuan mempermudah penyebaran pada sarana publik di masyarakat (4) Evaluasi di lakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah program aktualisasi telah berhasil, hal ini di lakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat dan melakukan review terhadap hasil dari kuesioner tersebut. Meskipun demikian, belum sepenuhnya berhasil menekan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Indonesia .

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa daftar kedalaman kemiskinan dan catatan tingkat kemiskinan di Indonesia periode September 2020 hingga Maret 2021 di Indonesia mengalami peningkatan dalam hal tingkat kemiskinan.

Salah satu penyebab utamanya adalah adanya ketidaktepatan penerima Bansos dari Kementerian Sosial yang diakibatkan oleh lemahnya pemukhtahiran DTKS peserta program Bansos, dalam hal ini adalah: Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai.

DTKS menjadi acuan mendasar dalam menentukan penerima Bansos dari program pelayanan sosial Republik Indonesia (Ruhya dan Ferdiansyah H, 2020). Penyegaran informasi DTKS yang dimaksud adalah penyegaran berkala terhadap keluarga penerima yang mendapatkan program bansos. Selain itu, hal ini juga berfungsi sebagai edukasi untuk membatasi kesalahan fokus program Bansos.

DTKS menjadi hal utama dalam menentukan sasaran dan strategi Dinsos dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga pemberian informasi DTKS kepada masyarakat menjadi faktor penting, agar sasaran dalam pemberian Bansos menjadi tepat dan tidak menimbulkan polemik kepada masyarakat.

Penelitian Antonius Richardo Ratu Da Costa dan Ignatius Adiwidjaja (2018) menemukan bahwa peran Dinsos dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program EWarong Kube PKH sudah cukup baik. Namun demikian, penelitian Beny Rachman, dkk (2018) menemukan bahwa efektifitas pelaksanaan Rastra dan BPNT termasuk dalam kategori sangat miskin (termasuk penerima Program PKH) belum sepenuhnya efektif.

Dinsos Kota Kendari melaksanakan salah satu tugas pokok, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan sosial, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa. Namun masih banyak permasalahan data Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai.

Berdasarkan hasil survei awal yang peneliti lakukan didapatkan informasi bahwa:

”Permasalahan yang terjadi terkait dengan DTKS adalah kurangnya pemahaman terhadap DTKS, Pengarsipan data, kurangnya informasi yang mudah di mengerti masyarakat dalam pengurusan DTKS, dan juga pengarsipan data yang belum baik (Sumber: wawancara dengan Pegawai Dinsos Ibu Endang, 15 Juni 2023).”

Hal tersebut sejalan dengan, hasil wawancara dengan salah seorang perwakilan masyarakat penerima Bansos yang menjelaskan bahwa:

”Sebagai penerima Bansos saya belum sepenuhnya memahami informasi tentang DTKS kaitannya dengan bantuan yang saya terima sehingga kondisi kehidupan ekonomi saya tidak berubah/masih tetap kekurangan (Wawancara dengan Bapak Dadang, 15 Juni 2023).”

Disamping itu, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kota Kendari menunjukkan peningkatan. Lebih jelasnya ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kota Kendari

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya Kemiskinan
2017	0,75	0,16
2018	0,70	0,21
2019	0,80	0,26
2020	0,67	0,16
2021	0,84	0,23

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Sehubungan adanya gap riset dan gap fenomena tersebut, maka dipandang perlu melakukan penelitian dengan judul: Optimalisasi Layanan Konsultasi DTKS Dalam Pemberian Bansos Pada Dinsos Kota Kendari.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif elusidasi untuk mengeksplorasi dan menjelaskan perkembangan penyelenggaraan konferensi informasi Bansos pemerintah di Bansos Kota Kendari. Lokasi penelitian dilakukan di Bansos Kota Kendari dengan informan penelitian berjumlah 5 orang yang dipilih secara purposive sampling, yaitu metode pemilihan informan yang didasarkan pada keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap penyelenggaraan Bansos di Kota Kendari. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan informasi Bansos, sementara wawancara mendalam dilakukan dengan para informan yang terlibat dalam penyelenggaraan Bansos untuk mendapatkan data yang mendalam dan komprehensif. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen

terkait penyelenggaraan Bansos, seperti Pedoman Pelayanan Sosial Nomor 3 Tahun 2021, laporan pelaksanaan, dan catatan administrasi.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, dilakukan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, atau grafik untuk mempermudah pemahaman dan analisis lebih lanjut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti membuat interpretasi atas data yang telah dianalisis dan memverifikasi temuan-temuan tersebut dengan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelenggaraan konferensi informasi Bansos pemerintah yang terkoordinasi di Bansos Kota Kendari, serta mengidentifikasi variabel pendukung dan penghambat dalam proses tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Layanan Konsultasi DTKS Dalam Pemberian Bansos Pada Dinsos Kota Kendari

Optimalisasi Layanan Konsultasi DTKS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan kegiatan dan perbaikan data diri warga miskin (KTP, KK), Kelayakan warga dalam DTKS, Berita acara dari Desa/Kelurahan, Pengecekan dan persetujuan data, Kunjungan lapangan, Input ke SIKS, Proses Dinsos, Laporan ke Walikota Kendari, Laporan ke Gubernur Sultra. Sehubungan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang merupakan perwakilan: (1) 2 warga penerima bansos, (2) Kepala seksi P2M, (3) Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Kendari, (4) Operator SIKS NG Kntor Walikota Kendari.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan yang mewakili warga masyarakat penerima Bansos mengatakan bahwa :

“Data yang perlu disiapkan untuk mendapatkan Bansos melalui Program Kartu Indonesia Pintar, adalah: (a) Kartu Keluarga (b) Akta Kelahiran (c) Surat Keterangan Tidak Mampu (d) Surat Pemberitahuan penerima Bantuan dari Kepala Sekolah” (Sumber: Wawancara dengan bapak Uun Wahyudi, 10 November 2023)

Sejalan hasil wawancara tersebut, informan lainnya yang mewakili warga masyarakat mengatakan bahwa :

“ Berikut informasi yang harus siap untuk menerima bansos dari Program Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan, Bansos/Bantuan Pangan Rashtra, dan Program Indonesia Pintar: (a) Fotokopi KTP (b) Fotokopi Kartu Keluarga (c) Lengkap formulir.” (Sumber: Wawancara dengan bapak Mail, 12 November 2023)

Hasil wawancara dengan kedua informan tersebut menunjukkan bahwa data yang perlu disiapkan untuk mendapatkan bantuan social tergantung pada jenis program Bansosnya. Berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam membantu warga untuk mendapatkan Bansos, hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan mengatakan bahwa:

“ Yang terlibat dalam membantu saya untuk mendapatkan Bansos melalui Program Indonesia Pintar adalah dari pihak sekolah yaitu guru yang membantu” (Sumber: Wawancara dengan bapak Uun Wahyudi, 10 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan warga masyarakat penerima Bansos dapat diketahui bahwa kegiatan dan perbaikan data diri warga miskin (KTP dan KK), Kelayakan warga, pengecekan dan persetujuan data, kunjungan lapangan, Input ke SIKS sudah terlaksana dengan baik, namun masih perlu memperhatikan tentang kesesuaian dan update data penerima bansos. Berkaitan dengan hasil wawancara ini, dapat diketahui bahwa pada pihak walikota Kendari setelah menerima laporan data penerima bansos dari Dinsos Kota Kendari lalu melakukan pengesahan dan memberikan tembusan laporannya ke Gubernur Sultra sekedar untuk di ketahui.

B. Faktor Pendukung Optimalisasi Layanan Konsultasi DTKS Dalam Pemberian Bansos Pada Dinsos Kota Kendari

Berdasarkan hasil peninjauan, variabel pendukungnya adalah kemudahan pengecekan dan pengesahan informasi DTKS pada Bansos Kota Kendari yang didukung oleh beberapa unsur. Salah satunya adalah penataan dukungan arahan khusus bagi para bos dan fasilitator SLRT, aksesibilitas kantor pendukung informasi para eksekutif, dan bantuan dinamis dari daerah setempat dalam siklus ini. Lebih banyak seluk-beluknya dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat persiapan dan arahan khusus yang diberikan kepada pimpinan dan fasilitator SLRT.

Pengarahan dan persiapan khusus dilakukan untuk melatih kemampuan petugas lapangan dalam menyelesaikan kewajibannya. Di Dinsos Kota Kendari, pelatihan tersebut telah

dijalankan untuk supervisor dan fasilitator SLRT, seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Kabid penanganan FM Dinsos Kota Kendari yang mengatakan bahwa:

“ Pelatihan diselenggarakan untuk memahami prosedur tugas yang akan dijalankan oleh supervisor dan fasilitator SLRT serta meningkatkan kompetensinya. Selain itu, ada pelatihan khusus untuk memperkenalkan penggunaan SIKS-NG dilakukan oleh Dinsos Kota Kendari untuk semua supervisor yang ada di Kota Kendari” (Sumber: wawancara dengan Marwanti Lily, 06 November 2023)

Hal yang sesuai juga dikatakan oleh Kepala Seksi P2M :

“ Kami mengirimkan orang untuk ikut mempersiapkan cara terbaik mengisi struktur informasi kelompok masyarakat A4 yang baru saja dilaksanakan dalam satu kali pertemuan.” (Sumber: Wawancara dengan Sunarti SKM, 14 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelatihan untuk pelaksana pengecekan dan persetujuan data di Dinsos Kota Kendari telah dilaksanakan bagi pelaksana teknis lapangan. Meskipun pelatihan hanya dilakukan sekali dan mungkin tidak efektif dari segi kuantitas, namun dari segi kualitas, para pelaksana lapangan tampaknya memahami baik mengenai Form A4 dan penggunaan aplikasi offline. Mereka merasa bahwa konsepnya mudah dipahami.

2. Adanya fasilitas yang mendukung bagi pelaksana pengelola data

Sarana merupakan perangkat atau fasilitas yang mendukung jalannya suatu kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Kendari mengatakan:

” Terkait dengan sarana yang diperuntukkan bagi operator sudah difasilitasi komputer, winternet, kursi kerja dan meja kerja, sehingga memudahkan dalam melakukan tugas. Namun demikian operator masih terbatas satu orang saja”(Sumber: Wawancara dengan Marwanti Lily, 06 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, operator Dinsos Kota Kendari dalam melaksanakan tugasnya, diruangan kerjanya terdapat gadget-gadget seperti PC, pendingin, meja, kursi dan berbagai peralatan kantor yang berfungsi sebagai alat dan pendukung administrator. dalam melakukan proses impor dan ekspor data untuk memperbaiki data penerima Bansos dalam aplikasi SIKS-NG.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinsos Kota Kendari telah memenuhi kebutuhan sarana bagi pelaksana dalam membantu cara yang paling umum dalam memeriksa dan mengesahkan informasi. Bagi pengelola eksekutif DTKS, kantor yang dapat diakses mencakup PC, kursi, pendingin, dan WiFi rahasia. Untuk sementara, bagi para manajer, stasiun kerja dapat diakses.

Fasilitator, karena latihan pemeriksaan dan persetujuan diselesaikan secara fisik, diberikan kantor, misalnya bangunan A4, kartu karakter, dan tanda kebesaran.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinsos Kota Kendari telah menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pengecekan dan persetujuan bagi petugas lapangan. Namun, supervisor terkadang mengeluh karena mereka harus menggunakan jaringan seluler pribadi saat melakukan verifikasi dan validasi. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya masalah terkait dengan kualitas jaringan yang mungkin menghambat pelaksanaan tugas mereka.

3. Partispasi Masyarakat

Proses pengecekan dan persetujuan bertujuan untuk menghasilkan data masyarakat, terutama penerima Bansos, yang akurat dan terkini. Dukungan dari masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pendataan ini, karena masyarakat memiliki data yang benar dan akurat yang diperlukan untuk menghasilkan data yang valid.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang penerima bansos mengatakan bahwa:

“ Sebagai warga, kalau sudah ada petugas turun kelapangan, saya langsung respon dengan cepat yaitu langsung memberikan kartu keluarga, kartu tanda penduduk untuk pendataan.” (Sumber: Wawancara dengan bapak Mail, 12 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, Diketahui bahwa partisipasi aktif Masyarakat sebagai pemilik informasi harus memperoleh informasi yang substansial dan berwawasan ke depan. Berdasarkan persepsi para peneliti lapangan di Dinas Bansos Kota Kendari, ternyata masyarakat menunjukkan kegairahan dalam mendaftar DTKS dengan datang langsung ke Dinas Bansos dan membawa arsip pendukung seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Dengan kehati-hatian yang ditunjukkan oleh daerah setempat, maka jalannya pengumpulan informasi, konfirmasi dan persetujuan informasi daerah setempat menjadi lebih mudah bagi para Bansos Kota Kendari, fasilitator dan pengelola.

C. Faktor Penghambat Optimalisasi Layanan Konsultasi DTKS Dalam Pemberian Bansos Pada Dinsos Kota Kendari

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menghambat optimalisasi layanan konsultasi DTKS dalam pemberian Bansos pada Dinsos Kota Kendari sebagai berikut:

1. Masih terdapat data yang tidak sesuai dengan Data pada Disdukcapil

Ketidaksesuaian data dapat menghambat upaya perbaikan dan pengajuan data, sehingga masyarakat diharapkan untuk menyelaraskan data mereka dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Kendari mengatakan :

“ Saat ini masih ada banyak data masyarakat yang perlu diperbaiki, termasuk nomor induk kependudukan, alamat, nama, tempat dan tanggal lahir. Terkadang, data tersebut tidak sesuai dengan catatan yang ada di Disdukcapil karena informasi dalam DTKS awalnya berasal dari Badan Pusat Statistik beberapa tahun lalu dan belum diperbarui. Oleh karena itu, saya harus menangani perbaikan data sendiri dengan melibatkan seorang operator untuk melakukan penulisan ulang.” (Sumber: wawancara dengan Marwanti Lily, 06 November 2023)

Melihat dari hasil pertemuan tersebut terlihat bahwa pengujian penyegaran/pengembangan informasi pada Bansos Kota Kendari merupakan kesalahan antara informasi daerah setempat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Umum dengan alasan bahwa informasi DTKS yang mendasarinya berasal dari Organisasi Pengukuran Fokal beberapa waktu lalu. Informasi di BPS selama ini belum sinkron dengan informasi Disdukcapil sehingga saat ini masih banyak informasi yang perlu diperbaiki.

Di samping itu, hambatan dalam pembaruan data juga disebabkan oleh fakta bahwa pengelolaan DTKS di Dinsos Kota Kendari hanya ditangani oleh satu staf, yaitu seorang operator yang bertugas dalam melakukan perbaikan data dan menerima usulan data dari 11 wilayah kecamatan secara bersamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Marwanti Lily, ia menjelaskan bahwa sampai saat ini sekitar 40% dari sekitar 7.000 data yang perlu disinkronkan telah diperbaiki. Meskipun demikian, masih banyak data yang bermasalah namun belum ditangani oleh operator. Hal ini menunjukkan perlunya penambahan staf operator untuk membagi tugas, sehingga perbaikan data dan pengajuan data baru dapat ditangani dengan lebih cepat dan efisien.

2. Data penerima Bansos masih ada yang belum terupdate

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Kendari menjelaskan bahwa:

“Saat ini, untuk memperoleh bantuan, penduduk harus terdaftar dalam DTKS dan data mereka harus sesuai dengan catatan Disdukcapil dan Dapodik. Jika data tidak sesuai, bantuan tidak akan diterima. Di Kota Kendari, masalah sering terjadi karena banyak data masyarakat yang tidak sesuai dan terjadi duplikasi NIK. Masalah lainnya adalah ketika anak mencapai usia 17 tahun dan harus memiliki KTP, tetapi KTP mereka belum dicetak sehingga data mereka menjadi tidak aktif. Banyak juga yang KTP-nya belum terdaftar

secara online oleh Disdukcapil. Kesalahan penulisan nama juga dapat mempengaruhi, seperti perbedaan nama antara DTKS dan Disdukcapil. Masalah lain adalah ketika kepala keluarga meninggal, kadang-kadang masyarakat lebih dulu mengganti Kartu Keluarga sehingga data kepala keluarga secara otomatis hilang dari DTKS, dan sebagai hasilnya, keluarga tersebut kehilangan akses terhadap bantuan.” (Sumber: wawancara dengan Marwanti Lily, 06 November 2023)

Mengingat dampak pertemuan tersebut, pemanfaatan informasi bagi penerima bansos cenderung belum disegarkan. Persoalan ini masih diangkat oleh Para Pihak berdasarkan informasi BPS beberapa waktu sebelumnya. Sehingga, ketika nama-nama calon penerima bansos diumumkan, banyak terjadi blunder informasi, misalnya NIK, nama, dan alamat yang tidak sesuai dengan catatan Disdukcapil. Selain itu, ada juga kasus KPM yang mewariskan atau pindah sehingga membuat informasinya tidak masuk akal. Kendala dalam pembaruan data juga disebabkan oleh fakta bahwa hanya ada satu operator yang mengelola data. Akibatnya, pelaksanaan pembaruan data tidak mencapai tingkat optimal. Dalam konteks ini, masyarakat juga diminta untuk secara aktif melaporkan setiap perubahan data yang terjadi, sehingga data yang dihasilkan selalu terkini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi P2M mengatakan bahwa:

“Koordinator PKH menyatakan bahwa pelaksanaan program Bansos tidak sepraktis sebelum adanya DTKS. Sebelumnya, mereka menggunakan aplikasi pendataan sendiri yaitu EPKH yang lebih mudah digunakan. Contohnya, saat ada ibu bersalin, mereka dengan gampang mendata. Tetapi, sejak menggunakan SIKS-NG, proses tidak secepat yang dulu. Sebelumnya, tidak ada tahap finalisasi, tetapi sekarang, setiap langkah harus disetujui oleh Walikota, yang mengakibatkan penundaan dalam proses.” (Sumber: Wawancara dengan Sunarti SKM, 14 November 2023)

Mengingat dampak dari pertemuan tersebut, ada kemungkinan bahwa upaya untuk memperbarui informasi daerah sedikit terhambat karena mereka harus menunggu persetujuan pasti dari pimpinan Balai Kota. Meski demikian, perubahan kondisi wilayah di lapangan terus terjadi dengan cepat, dalam berbagai rentang waktu, mulai dari jam, hari, hingga bulan. Kendala ini tidak bisa dihindari mengingat pentingnya siklus kesimpulan untuk menjamin informasi yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan informasi di tingkat subdaerah, sehingga program bansos dapat disebarluaskan. melacak.

3. Data Kemensos tidak Tepat Sasaran

Dalam menentukan penerima bansos oleh Pelayanan Para Pihak. Setelah Dinas Pihak memutuskan calon penerima bansos, informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Dinas Sosial untuk proses konfirmasi dan persetujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Kepala Seksi P2M :

“Setelah nama-nama dikirim oleh Kemensos, banyak di antaranya yang tidak sesuai sasaran, seperti KPM yang telah pindah, meninggal, atau telah mencapai kriteria kemampuan. Selain itu, ada juga KPM yang tidak berhasil ditemukan. Setelah menerima nama-nama tersebut, kami melakukan pengecekan dan persetujuan sesuai prosedur yang tercantum dalam formulir A4. Jika ditemukan bahwa seseorang telah mampu atau telah pindah, kami mencatat informasi tersebut di formulir. Setelah selesai, formulir tersebut kami serahkan kepada Supervisor. Namun, masih ada kendala, karena meskipun perbaikan telah dilakukan, beberapa nama masih muncul kembali dalam tahap selanjutnya.” (Sumber: Wawancara dengan Sunarti SKM, 14 November 2023)

Hal yang sesuai juga dikatakan oleh Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Kendari, bahwa:

“ Saat ini, perbaikan data dilakukan sekali sebulan, namun belum optimal karena masih ada KPM yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap mendapatkan bantuan, meskipun sudah diperbaiki. Ini mengakibatkan kesalahan inklusi masih terjadi, yang pada akhirnya menghambat proses impor dan ekspor data. Selain itu, aplikasi sering mengalami gangguan karena spek PC yang digunakan tidak berjalan dengan baik aplikasi yang sedang berjalan, terutama ketika beberapa tugas lain seperti membuka Microsoft Word, Excel, dan sebagainya juga sedang dilakukan secara bersamaan.” (Sumber: wawancara dengan Marwanti Lily, 06 November 2023)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengecekan dan persetujuan data telah dilakukan dengan baik oleh Dinsos Kota Kendari, namun di tingkat pusat, tidak ada tanggapan terhadap perubahan dan usulan data yang diajukan. Hal ini menyebabkan terjadi kesalahpahaman antara Kementerian Sosial dan Dinsos Kota Kendari. Akibatnya, perbaikan data yang seharusnya ditindaklanjuti dengan cepat terhambat oleh sistem yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, optimalisasi layanan konsultasi DTKS dalam pemberian Bansos di Dinsos Kota Kendari sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2021. Meskipun telah ada upaya, namun belum mencapai tingkat optimal karena masih terdapat kendala terkait ketidaksesuaian data seperti NIK, nama, dan alamat, serta ketidakpembayaran data. Kendala ini terkait dengan pengelola data DTKS di Dinsos Kota Kendari yang hanya terdiri dari satu orang, sehingga usaha perbaikan data belum memberikan hasil yang maksimal. Kedua, faktor pendukung dalam proses pengecekan dan persetujuan data DTKS di Dinsos Kota Kendari meliputi bimbingan teknis bagi supervisor dan fasilitator SLRT, ketersediaan fasilitas untuk pengelolaan data, serta dukungan dari

masyarakat. Namun, faktor penghambat meliputi adanya ketidaksesuaian data masyarakat dengan catatan di Disdukcapil, serta penggunaan data penerima bantuan yang belum selaras. Dalam konteks ini, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk memperbaiki koordinasi dan konsistensi data guna meningkatkan efektivitas dan akurasi penyelenggaraan Bansos di Kota Kendari.

REFERENSI

- Adwidjaja, Ignatius dan Costa Antonius Richardo Ratu Da dan Ignatius. 2018. “Peran Dinsos Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan di Kota Malang.”
- Azhari, Septian Cahya, Erni Mulyanie, dan Septian Indri Saputri. 2022. “Kegiatan Pengecekan dan Persetujuan Data Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT Melalui Program Pejuang Muda di Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.” *Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendidikan* 5 No. 1.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bansos di Lingkungan Kementrian Sosial. 2019.
- Rachaman, Benny dan Adang Agustian. “Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).” *Analisis Kebijakan Pertanian*.
- Ramadhona, dan Novri Roja. 2022. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Bansos Pangan di Sumatera Barat Menggunakan Analisis Jalur.” Universitas Negeri Padang.
- Rambe, Viki Setiawan. 2019. “Peran Dinsos Dalam Melakukan Bimbingan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengetesan Kemiskinan di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Sedang.”
- Ruhyana, N.F dan H. Ferdiansyah. 2020. “Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten sumedang dalam Pemberian Bansos di Masa Pandemi Covid 19.” 4(2): 1–17.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.